

# Peningkatan Pemahaman Perpajakan Pph Orang Pribadi dan Badan

INOVA FITRI SIREGAR<sup>1\*</sup>; RINAYANTI RASYAD<sup>2</sup>; DINI ONASIS<sup>3</sup>

Universitas Lancang Kuning  
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581  
\*E-mail : inova@unilak.ac.id (korespondensi)

**Abstract:** The problems experienced by financial staff are ignorance and lack of access to information and socialization and even the low awareness of taxpayers on their tax obligations is still an obstacle to the low compliance of taxpayers to pay tax debts. Then the lack of understanding of the financial staff in the calculation of the aspect of the new income tax rate and how much it is charged differently by each taxpayer, filling in the SPT that must be reported on the income they receive, with the obligation to report it. As we know that currently the DGT issues a lot of SP2DK in order to fulfill the tax revenue target to support the APBN in overcoming the current pandemic. Then the summons of SP2DK (Request for Data and Information Explanation) every year makes the financial staff confused about what they should do with the confirmation of the summons. Especially if SP2DK contains data with tax calculations for the past 5 years. The method used is training and assistance in tax planning and bookkeeping. The success of the applied method is measured by using a process and product approach through observation and interviews during and after the training activities take place. The data collected is participant attendance and training and counseling products in the form of taxation and bookkeeping materials. The training activities are designed in three stages consisting of the preparation, implementation and monitoring stages.

The result of this service is that there is an increase in participants' knowledge and understanding of Article 21 Personal Income Tax Training for financial staff from the evaluation results through post test answers which have increased significantly where 90% already know how to calculate Article 21 Income Tax for individuals and entities and know the benefits. financial staff at the time before the training was held only 50% knew about Income Tax Article 21 for individuals and entities. Even with the socialization that was carried out by simulating one company case, there was optimism and enthusiasm for the participants towards the ability to understand and calculate the Article 21 Income Tax for individuals and entities.

**Keywords:** *Tax, Tax Income*

Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari seluruh potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak seakan terus berburu pungutan masyarakat ini dengan berbagai upaya dan trik agar pajak akan

terus menyandang primadonanya pendapatan negara di sektor non migas. Setiap waktu setiap saat melakukan perubahan dan mengeluarkan peraturan baru untuk mengisi pundi-pundi negara lewat pungutan pajak. Jargon terdahulu "orang bijak bayar pajak" dan berubah menjadi "bayarlah pajak awasi penggunaannya" setelah banyak kasus mafia pajak bermunculan membuat mau tidak mau suka tidak suka masyarakat yang sudah berNPWP harus bayar pajak sebagai warga negara yang baik.

Di beberapa wilayah termasuk di Riau terdapat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah

penghimpun pajak Negara. Selanjutnya DJP dibantu oleh instansi dibawahnya yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak diantaranya adalah di bidang Pajak Penghasilan.

Pemerintah akan memulai upaya intensif menyadarkan setiap wajib pajak untuk membayar pajak, karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada pengusaha kena pajak. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus memperluas basis penagihannya. Sulitnya menghitung pajak merupakan salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan juga mengalami hal yang sama. Padahal bagi Wajib Pajak badan, ada kewajiban membuat laporan keuangan. Selain sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan *stakeholders*, laporan keuangan juga sumber data untuk menghitung pajak. Dalam praktiknya sangat sering Wajib Pajak bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau bayar pajak. Bila demikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang sudah terformulasi. Dan karena urusan pajak umumnya dianggap rumit oleh wajib pajak maka diperlukan adanya unit khusus pada Kantor Pelayanan Pajak yang melayani wajib pajak.

Proses penghitungan pajak tersebut yang akan menghasilkan jumlah pajak yang adil tanpa memberatkan Wajib Pajak namun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, formulasi menghitung pajak adalah dasar pengenaan pajak dikalikan tarif. Dasar pengenaan pajak untuk tiap jenis pajak berbeda satu

sama lainnya. Untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) disebut penghasilan kena pajak (PKP).

Permasalahan yang dialami oleh Staf Keuangan pada perusahaan setiap tahunnya adalah Ketidaktahuan dan minimnya akses informasi dan sosialisasi bahkan rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya masih menjadi kendala rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar utang pajak. Kemudian ketidakpahaman Staf Keuangan dalam perhitungan dari aspek tarif pajak penghasilan yang dikenakan berbeda oleh masing-masing wajib pajak, pengisian SPT yang wajib dilaporkan atas penghasilan yang mereka terima, dengan adanya kewajiban melapor tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini DJP banyak menerbitkan SP2DK dalam rangka pemenuhan target penerimaan pajak guna menunjang APBN dalam mengatasi pandemic yang terjadi pada saat ini. Kemudian dengan adanya pemanggilan SP2DK ( Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan ) setiap tahun membuat staf keuangan kebingungan apa yang harus mereka lakukan dengan konfirmasi atas surat panggilan tersebut. Apalagi jika SP2DK memuat data dengan perhitungan pajak 5 tahun belakang,

Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan pemahaman staf keuangan dan siswa dalam pencatatan, penyajian dan pelaporan keuangan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tingkat pemahaman yang masih kecil dan kurangnya pelatihan dan sangat perlu disosialisasikan.

Permasalahan yang dihadapi Staf Keuangan terkait dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

- a) Keterbatasan pendampingan yang dilakukan oleh Staf Keuangan dari segi pengetahuan dan keterampilan dalam hal perpajakan sehingga berpengaruh pada pelaporan setiap tahunnya.

- b) Terbatasnya sarana dan prasarana karena kurang informasi yang berhubungan dengan kewajiban usahanya dalam pencatatan usaha dan informasi kewajiban perpajakan bagi Staf Keuangan

Sesuai dengan penjelasan situasi yang dipaparkan pada pendahuluan dan analisis situasi, maka pada program pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan saat ini adalah melakukan peningkatan pemahaman Pajak penghasilan Pasal 21 dan PPh Badan Orang Pribadi dan Badan Bagi Staf Keuangan. sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan melalui langkah-langkah manajemen perpajakan yang baik. Langkah-langkah tersebut meliputi perencanaan pajak untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan.

Program pengabdian pada masyarakat ini dapat memberi solusi antara lain: Pemberian pemahaman pajak kepada Staf Keuangan; Pemberian pemahaman konsekuensi logis bahwa dengan melaksanakan kewajiban perpajakan maka harus memahami dan terampil dan handal dalam melakukan pembukuan bagi Staf Keuangan.

## **METODE**

Metode kegiatan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelatihan dan pendampingan Staf Keuangan dalam perencanaan pajak. Dalam hal ini ketua program dan anggotanya berperan sebagai mediasi.

### **Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan harapan yakni: Melakukan pemberian materi perpajakan kepada Staf Keuangan berdasarkan data yang ada yang dipandang memiliki kemampuan sumber daya manusia dan keuangan yang memenuhi syarat sesuai peraturan pajak (PP No. 46 Tahun 2013) atau dapat menjadi Wajib Pajak sesuai ketentuan KPP; Menginformasikan kegiatan kepada

Staf Keuangan; Melakukan komunikasi intensif dengan para Staf Keuangan; Memberikan kuesioner pengabdian; Mencari tempat untuk dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi para Staf Keuangan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; Membuat dan memberikan surat undangan kepada peserta sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan.

### **Pelaksanaan kegiatan.**

Sesuai dengan dana yang tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan satu kali dengan rencana kegiatan yang dilakukan adalah a) mengkaji kebijakan tentang PP No. 46 Tahun 2013 dan standar akuntansi bagi Staf Keuangan terkait pelaporan pajak. b) mempertemukan pihak yang terlibat dalam penyuluhan dan pendampingan perencanaan pajak dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Evaluasi Keberhasilan**

Hasil yang diterima dari kegiatan ini, dianalisis kembali oleh pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan kekurangan dan hal-hal yang harus dilakukan lagi agar tujuan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat praktis kepada semua pihak yang terlibat dalam pelatihan perencanaan pajak bagi Staf Keuangan

## **HASIL**

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan oleh Staf keuangan. Acara bertempat di Ruang Rektorat dengan judul “Peningkatan kemampuan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 dan PPh Badan bagi Staf keuangan”. Sebelum kegiatan penyampaian materi mengenai pajak penghasilan dan bagaimana menghitung pajak penghasilan pasal 21 OP dan Badan tim dosen memberikan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman mengenai materi yang akan diberikan pada saat pengabdian ini. Pada kegiatan pembekalan ini peserta sangat

antusias mengikuti materi pembekalan terutama untuk materi Pajak penghasilan Pasal 21 dan PPh Badan yang diarahkan kepada perhitungan masing-masing penghasilan pada staf yang menghitung PPh OP dan Badan masing masing perusahaan. Jumlah Pertanyaan yang diberikan kepada Staf keuangan sebanyak 10 pertanyaan

Kesulitan yang paling mendasar dialami oleh staf keuangan adalah kurangnya pemahaman atas apa yang mereka lakukan apabila adanya SP2DK dan bagaimana potongan pajak atas penghasilan apapun yang mereka terima dari pertama kali mengajar hingga pada saat ini. Hal ini disebabkan oleh mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai bagaimana perhitungan pajak penghasilan.

Ketika kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2022, jumlah staf keuangan yang hadir sebanyak 8 orang. Pada kegiatan ini , tim dosen memberikan materi dasar (konsep) pajak penghasilan, bagaimana wajib pajak harus membayar pajak atas penghasilannya, jumlah besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga tariff yang dikenakan pada Pph 21 , setelah tim dosen memberikan materi konsep dasar pph 21, tim memberikan contoh kasus perhitungan Pph 21 dan memberikan simulasi kepada staf atas penghasilan yang mereka peroleh setiap bulan pada pegawai yang mereka hitung.

## PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan secara garis besar mencakup beberapa komponen, yaitu keberhasilan target jumlah peserta pelatihan, ketercapaian target materi yang telah direncanakan, ketercapaian tujuan pelatihan dan kemampuan peserta dalam penguasaan materi. Ketercapaian target jumlah peserta dapat dilihat dari jumlah peserta yang ditargetkan adalah 10 orang dan pada kenyataannya kegiatan diikuti sebanyak 8 orang sehingga target jumlah peserta hampir telah dapat terpenuhi. Semua peserta dapat mengikuti seluruh proses simulasi dari awal sampai selesai, kegiatan yang dirancang

100% terlaksana, dan kehadiran kesiapan tim 100%. Target penyampaian materi simulasi juga tercapai karena materi dapat disampaikan secara keseluruhan. Dengan demikian maka tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terpenuhi.

Kegiatan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 dan PPh Badan bukanlah pekerjaan yang mudah. Ditambah materi SP2DK dan bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan apabila terjadi pemanggilan. Untuk dapat menghasilkan pemahaman yang baik, diperlukan latihan yang banyak. Kemampuan menghitung dan memahami ini tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Latihan ini memerlukan ketekunan dan kebiasaan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi faktor pendukung dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat adalah adanya kerjasama yang baik antara tim pengabdian kepada masyarakat dengan peserta pengabdian kepada masyarakat yaitu pada staf keuangan; dan adanya kerjasama yang baik antara tim pengabdian kepada masyarakat dengan pada staf keuangan beserta jajarannya dalam mensupport terselenggaranya kegiatan ini dalam bentuk pemberian fasilitas ruangan, proyektor, menghadirkan para staf keuangan.

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat memberikan buku Penyelesaian SP2DK, studi kasus menjawab SP2DKk, ap aitu SP2DK dan bagaimana cara menjawabnya.

## SIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan oleh Staf keuangan. Acara bertempat di Ruang Rektorat dengan judul “Peningkatan kemampuan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 dan PPh Badan bagi Staf keuangan”. Sebelum kegiatan penyampaian materi mengenai pajak penghasilan dan bagaimana menghitung pajak penghasilan pasal 21 OP dan Badan tim dosen memberikan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman mengenai materi yang akan

diberikan pada saat pengabdian ini. Pada kegiatan pembekalan ini peserta sangat antusias mengikuti materi pembekalan terutama untuk materi Pajak penghasilan Pasal 21 dan PPh Badan yang diarahkan kepada perhitungan masing-masing penghasilan pada staf yang menghitung PPh OP dan Badan masing masing perusahaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fitriandi, Primandita. 2006. *USKP Review – Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kantor Pelayanan Pajak. 2007. *Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang ribadi (SPT 1170 beserta lampiran-lampirannya)*. www.pajak.go.id
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azhar Mohamad, Neazlin Radzuan, Zarinah Hamid, *Journal Of Financial CrimeTax Arrears Amongst Individual Income Taxpayers In Malaysia*
- <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JFC-10-2015-0055>
- Antonio Martin, *An Assessment Of Recent Trends On Income Taxation And Environmental Policy In Portugal*. <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/14777831111136036>
- Don Bruce, Jon C. Rork, Gary Wagner. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*
- State income tax reciprocity agreements and small businesses*. <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JEPP-07-2012-0037>
- Fadi, Martin and Roberto. *The Determinants of Tax Morale and Tax Compliance: Evidence from Jordan*. Book Series: Advances in Taxation. Series ISSN: 1058-7497 <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/S1058-749720160000023005>Ferguson. *Personal Income taxation: An Evaluation Of The Argument For A Personal Expenditure Tax* Studies in Economics and Finance ISSN: 1086-7376 Online from: 1977. <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/eb028623>
- Hendri. David, James . *Tax Compliance Intentions Of Low-Income Individual Taxpayers* <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1016/S1475-1488%2804%2907001-2>
- John Creedy . *Income taxation and the accounting period: A simulation analysis*. *Journal of Economic Studie*. <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/01443589810233856>
- Rebekah. *Corporate Income Tax Systems and State Economic Activity* Book Series: Advances in Taxation. Series ISSN: 1058-7497. <http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/S1058-749720140000021004>